BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK USAHA
PERSEWAAN MOBIL DI DUSUN BUARAN KEBOGUYANG
JABON SIDOARJO**

**A. Analisis Terhadap Praktek Usaha Persewaan Mobil Di Dusun Buaran
Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo**

Dalam ketentuan usaha persewaan mobil di Dusun Buaran Keboguyang pada bab III dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemilik mobil memperoleh intensif dari usaha persewaan mobil yang diperoleh dalam pembagian hasil yaitu selama satu bulan. Hal ini disepakati sebesar Rp. 200.000,00.
2. Pemanfaatan obyek sewa dilakukan selama batas waktu yang diperjanjikan oleh pihak penyewa atau orang yang menyewakan.

Merujuk dari kenyataan yang ada bahwa pada garis besarnya bila dianalisis dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam usaha persewaan mobil, maka perjanjian akad tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena kedua belah pihak yang melakukan akad perjanjian telah memenuhi persyaratan yang ada dan sesuai dengan hukum Islam. Seperti telah dijelaskan dalam hadist:

أَلَا أَوَّلُ فِي الْعُقُودِ ضَمُّ الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا التَّرَمُّهُ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya: “Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut”¹

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa hukum asal dalam bermuamalah adalah boleh dalam artian selagi tidak ada dalil yang melarang (mengharamkan) terhadap transaksi tersebut.

Karena tujuan dari bermuamalah tersebut adalah tolong menolong antar sesama, untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Sebagaimana firman Allah dalam (QS. al-Ma’idah ayat: 2):

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”²

Bentuk usaha ini dapat digolongkan pada bentuk sewa-menyewa atau dalam istilah menurut hukum Islam *al-ijarah*. Ijarah adalah perjanjian atas manfaat benda kepada orang lain dengan ganti pembayaran dan syarat-syarat tertentu. Dikatakan dalam bentuk ijarah karena, pemilik mobil memberikan manfaat dari obyek sewa yaitu mobil kepada penyewa.

¹Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Fiqhiyah*, Cet II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 184.

² Depag RI, *Al-qur’an dan Terjemahannya*. 106

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Usaha Persewaan Mobil Di Dusun Buaran Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

1. Analisis Dari Segi Akad

Pada hakekatnya akad dinyatakan sah dengan Ijab Qabul. Akad menurut bahasa adalah ikatan dan persetujuan. Sedangkan pengertian akad menurut istilah adalah ungkapan kata-kata antara pemilik mobil dengan penyewa yang bertujuan untuk membuktikan kesepakatan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Perjanjian sewa menyewa yang berlangsung antar sesama adalah persoalan yang berdasarkan pada kerelaan jiwa yang tidak diketahui lantaran sembunyi. Karena itu syariat menetapkan, ucapkanlah yang menjadi ungkapan apa yang terdapat didalam jiwa.

Sewa menyewa berlangsung dengan Ijab Qabul. Pengertian dari Ijab adalah ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari dan salah satu pihak. Dan Qabul, yang kedua. Dan Ijab Qabul tidak ada kepastian menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada dalam akad dengan bertujuan dan mana bukan dengan kata-kata itu sendiri.

Diperlukan adanya saling ridla (rela), direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau cara lain yang dapat menunjukkan keridlaan dan berdasarkan makna pemilik. Adapun subyek sewa-menyewa dalam usaha ini adalah pishak-pihak (orang) yang terlibat dalam pelaksanaan akad sewa

menyewa tersebut, yang secara umum disebut pihak penyewa dan pihak yang menyewakan.

Akad sewa-menyewa dipandang sah apabila para pihak yang melakukan akad atau subyek akad memenuhi syarat dan mempunyai kecakapan di dalam melakukan perbuatan hukum. Kecakapan melakukan tindakan hukum ada yang sempurna dan ada yang tak sempurna, sesuai dengan tahapan manusia. Untuk kecakapan sempurna seseorang yaitu orang yang telah mempunyai kemampuan untuk menerima beban, baik kemampuan untuk menerima hak maupun kewajiban, yaitu kepantasan seseorang untuk diberi hak dan kewajiban maupun kemampuan untuk berbuat, maksudnya yaitu kepantasan seseorang untuk dipandang sah perkataan dan perbuatannya melakukan tindakan hukum.³

Adapun dalam ijarah, mengenai barang yang harus dimiliki oleh akid atau memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian ijarah *al-fudul* (ijarah yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadi dasar ijarah.

Al- Qur'an sebagai dasar hukum tertinggi telah memberikan suatu aturan tentang transaksi atau bermuamalah, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 1:

³ Muhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, hlm. 165.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu".⁴

Dalam ayat yang telah dijelaskan bahwa apabila seseorang telah melakukan suatu akad perjanjian, maka diperintahkan untuk memenuhinya, baik itu janji prasetya hamba Allah ataupun perjanjian manusia dalam pergaulan sesamanya dalam bermua'amalah.

Berdasarkan uraian tersebut maka cara melaksanakan akad sewa-menyewa usaha mobil di Dusun Buaran Keboguyang tidaklah menyimpang dari prinsip dan dasar hukum Islam.

Dalam akad sewa-menyewa adanya syarat-syarat yang dicantumkan dalam akad sewa yaitu adanya uang sewa yang ditentukan oleh pihak penyewa setelah dilakukan di awal perjanjian, maka akad sewa-menyewa tersebut menjadi sah. Sesuai dengan syariat Islam.

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلًا لَّا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا مُؤَنَ الْمُسْلِمِينَ
عَلَى شَرِّ وَطَلَّهِمْ إِلَّا شَرَطَ حَرَّمَ حَلًا لَّا أَوْ أَحَلَّ كَرَامًا

Artinya: "Perdamaian yang dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".⁵

⁴ Departemen Agama RI, hlm. 155.

⁵ Husein Bahreisy, *Hadist Sahih Bukhari*, Himpunan Hadist Pilihan, hlm. 170.

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa perdamaian dapat dilakukan antara sesama manusia dalam hal apapun termasuk dalam bermu'amalah, kecuali perdamaian yang mengikat syarat-syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

Dalam usaha persewaan sewa mobil ini mengandung syarat-syarat yang sudah jelas dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

2. Analisis Dari Segi Subyek dan Objek

Berdasarkan data penulis dilapangan, bahwa kedua orang yang berakad (*al-muta'qqidaini*). Dalam pelaksanaan sewa-menyewa pada dasarnya sudah sesuai dengan syari'at Islam, karena pemilik mobil sebagai pemilik dan telah merelakan mobil tersebut untuk dimanfaatkan oleh pihak penyewa. Sebagaimana dalam firman Allah (QS. an-Nisa' ayat: 29)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Selain itu baik dari pihak penyewa atau yang menyewakan dalam melakukan akad ijarah sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna sehingga segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Merujuk dari kenyataan, bila dianalisis dari subyek maka tidak bertentangan karena kedua belah pihak yang berakad telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan hukum Islam.

Selanjutnya dianalisis dari obyek sewa yaitu mobil. Pada waktu akad tidak dijelaskan sampai kapan atau berapa lama mobil tersebut mampu dimanfaatkan oleh pihak penyewa.

Dalam rukun dan syarat sah sewa-menyewa dijelaskan bahwa obyek ijarah harus sesuatu yang dihalalkan oleh syara' dan manfaat barang (obyek) dalam hak yang mubah bukan keharaman (larangan).⁶

Dari pernyataan diatas, sudah jelas tidak sesuai dengan syari'at Islam karena adanya kesamaran berapa lama mobil tersebut mampu dimanfaatkan oleh penyewa.

Maka dari beberapa uraian diatas, praktek usaha persewaan di Dusun Buaran Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo belum memenuhi syarat-syarat sah sewa.

⁶ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 54.